KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Larangan Buka Bersama Percepat Transisi Endemi
Tanggal : Jumat, 24 Maret 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Larangan Buka Bersama Percepat Transisi Endemi

Selain untuk mencegah penyebaran kasus covid-19, imbauan itu untuk menghindari sorotan publik atas gaya hidup pejabat publik yang belakangan mendapat kecaman dari masyarakat.

Indriyani Astuti
indriyani@mediaindonesia.com

GUNA mempercepat proses transisi dari pandemi menuju endemi, Presiden Joko Widodo meminta kegiatan buka bersama khusus bagi pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) ditiadakan. Larangan buka bersama itu tertuang pada surat Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Isi surat itu meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, para menteri, kepala instansi, kepala lembaga, serta kepala daerah diminta mematuhi arahan Presiden dan meneruskan kepada semua pegawai di instansi masing-masing.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Selain untuk mencegah penyebaran kasus covid-19, sambung politikus PDIP itu, imbauan Kepala Negara bertujuan menghindari sorotan publik atas gaya hidup pejabat publik yang belakangan mendapat kecaman dari masyarakat.

"Pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat melakukan buka puasa bersama," ujar Pramono dilansir dari *Youtube* Sekretariat Presiden, kemarin.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan arahan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan bersama agar mempercepat menuju endemi. "Kita perlu ingat cakupan vaksinasi *booster* dosis 1 dan dosis 2 belum optimal, jadi ASN diminta tetap waspada," ujarnya, kemarin.

Senada, Kementerian Keuangan mengatakan siap melaksanakan arahan Presiden terkait larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan para ASN. "Kemenkeu menyambut baik dan siap melaksanakan arahan Presiden," kata juru bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo.

Pro dan kontra

Arahan Presiden tersebut mengundang beragam tanggapan dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai kebijakan tersebut bisa memicu kebingungan di tengah masyarakat. Kebingungan disebabkan alasan pemerintah melarang buka bersama, yaitu penanganan covid-19 yang masih dalam masa transisi dari pandemi ke endemi.

Di sisi lain, berbagai acara besar seperti konser musik diperbolehkan dalam beberapa waktu belakangan. "Semuanya dilakukan secara lancar-lancar saja. Acara buka puasa ini saya kira sebanyak-banyaknya paling hanya 500 orang," ujar politikus Partai NasDem itu.

Sahroni menambahkan ia tidak dalam posisi pro dan kontra trerhadap arahan Jokowi tersebut. Sahroni hanya ingin kebijakan tersebut disertai dengan alasan yang lebih konkret agar masyarakat mendapat kejelasan dan tidak menduga-duga.

Senada, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan tersebut bisa dipelesetkan jadi melarang buka bersama yang dilakukan masyarakat.

Sebaliknya, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan imbauan tersebut bukan berarti pemerintah melarang aktivitas keagamaan. Ia memahami alasan Jokowi membuat kebijakan tersebut. Dibutuhkan kehatihatian lantaran masih terbuka kemungkinan adanya penyebaran virus covid-19 di tempat-tempat yang jadi kerumunan massa. "Secara global, status penanganan covid-19 masih pandemi. WHO sampai saat ini belum berubah. Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut," tandasnya. (Iam/Try/Ant/Medcom/RO/H-3)